

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG *ASHABIYAH***

#### **A. Pengertian *Ashabiyah***

Ibnu Khaldun mengemukakan teori mengenai pembentukan, kejayaan, dan keruntuhan negara. Ia memperkuat teorinya itu dengan peristiwa-peristiwa yang disaksikannya. Teori yang dimaksud adalah teori "*Ashabiyah*".

Teori ini menjadi tema studi-studi modern, terutama yang berkaitan dengan kedekatan suatu kelompok di manapun berada, baik dalam konteks kekuasaan. Teori ini membuka jalan bagi kemunculan teori "loyalitas" yang sekarang menjadi kajian pokok bagi studi-studi tentang gerakan nasionalisme dan gerakan politik secara umum.

Arti *Ashabiyah* menurut Ibnu Khaldun adalah solidaritas yang ditunjukkan setiap orang terhadap keturunan dan golongannya (solidaritas kelompok), kasih sayang dan cinta pada keluarga sedarah dan sekerabat adalah watak manusia yang dianugerahkan Allah ke dalam kalbu hamba-hambanya. Sifat ini menimbulkan rasa saling membantu dan gotong-royong serta memperbesar rasa takut musuh. Jadi *Ashabiyah* ini adalah satu ikatan solidaritas kelompok dalam satu keturunan atau kerabat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV.PusakaSetia, 2010),h. 419-420

Kata *kerabat* berasal dari kata *qarribun*, artinya adalah karib atau dekat. Istilah lain dalam bahasa Indonesia yaitu untuk kata kerabat adalah saudara dan sedangkan bahasa Sunda yaitu dulur atau baraya.

Dalam hukum keluarga, yang dimaksud dengan “*kerabat adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat atau karib dengan seseorang karena pertalian darah, perkawinan, dan pengakuan*”. Kerabat karena pertalian darah disebut *kerabat sedarah*, kerabat karena pertalian perkawinan disebut *kerabat semenda*, dan kerabat karena pengakuan disebut *kerabat angkat*.<sup>2</sup>

*Ashabiyah* ada yang memiliki arti luas, ada pula yang memiliki arti sempit. Artinya *Ashabiyah* tidak hanya memiliki satu level. Ibnu Khaldun berkata: “ketahuilah, setiap kampung dan suku, di samping terikat pada keturunan mereka yang bersifat umum, mereka pun terikat pada solidaritas keturunan lain yang sifatnya khusus. Solidaritas yang terakhir ini lebih mendarah daging dari pada solidaritas keturunan yang sifatnya umum. Seperti solidaritas yang terdapat pada satu marga, pada satu keluarga, atau pada satu saudara sekandung yang terdapat pada seperti saudara sepupu, baik yang dekat maupun yang jauh silsilah keturunannya. Orang-orang tersebut di atas lebih dekat pada solidaritas keturunan mereka yang lebih khusus dari pada solidaritas keturunan mereka yang sifatnya umum. Sebab, solidaritas keturunan yang khusus lebih terikat pada tali persaudaraan sedarah.

Ibnu Khaldun ini menjelaskan bahwa solidaritas terkadang mempunyai cakupan luas yang diikat oleh keturunan yang sifatnya

---

<sup>2</sup>Otje Salman., dkk, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2002), h. 29

umum pada suatu kabilah atau famili yang secukupnya luas. Terkadang pula mempunyai cakupan sempit sehingga terbatas pada saudara sepupu atau saudara saja. Pada cakupan kedua, solidaritas menjadi lebih kuat karena lebih terikat pada tali persaudaraan sedarah.<sup>3</sup>

### **B. Tujuan *Ashabiyah***

Tujuan akhir *Ashabiyah* atau solidaritas sosial adalah kedaulatan karena telah diterangkan bahwa solidaritas sosial itulah yang membuat orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama yaitu: mempertahankan diri, dan menolak atau mengalahkan musuh. Dan telah kita ketahui juga bahwasannya tiap-tiap masyarakat umat manusia memerlukan kekuatan yang berfungsi mencegah, juga seorang pemimpin yang bisa mencegah manusia dari saling menyakiti. Pimpinan semacam itu harus mempunyai kekuatan pembantu di tangannya, sebab kalau tidak, maka ia tidak akan dapat menjalankan tugas pencegah itu. Kekuasaan yang dimilikinya adalah kedaulatan yang melebihi kekuasaan seorang kepala suku memegang pimpinan dan diikuti oleh orang-orang yang sebenarnya tidak dapat dipaksanya menurut kemauannya. Sebaliknya kedaulatan adalah memerintah dengan paksa melalui alat kekuasaan yang ada di tangan orang yang memerintah itu.

Orang-orang yang memiliki solidaritas sosial dan lalu ia telah menduduki jabatan kepala suku serta ditaati oleh orang, jika suatu ketika menemukan jalan untuk memiliki kedaulatan, ia tidak akan

---

<sup>3</sup>Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, ....., h. 420

mengabaikannya, sebab memang demikian yang diharapkan. Namun dia tidak akan mencapai maksud tersebut dengan sempurna apabila dia tidak memiliki solidaritas sosial yang menyebabkan orang lain tunduk patuh kepadanya. Demikianlah kedaulatan kerajaan merupakan tujuan akhir solidaritas sosial (*Ashabiyah*).

Perlu diketahui, meskipun suatu suku memiliki bermacam-macam rumah dan banyak solidaritas sosial, mestilah ada satu solidaritas sosial yang lebih kuat dari seluruh solidaritas yang ada, sehingga yang lainnya berada dibawahnya. Solidaritas sosial yang beraneka ragam itu seolah lalu nampak sebagai satu solidaritas sosial yang terbesar.

Solidaritas sosial tersebut memperoleh kedaulatan atas rakyat golongannya, maka sesuai dengan wataknya, ia akan mencari solidaritas sosial golongan lain yang tak ada hubungan dengannya. Apabila solidaritas sosial yang satu sama dengan yang lain, maka orang-orang yang berada di bawah masing-masing solidaritas sosial akan sebanding dan sama. Dalam keadaan demikian masing-masing solidaritas sosial akan tetap memegang kekuasaannya atas daerah dan rakyatnya. Demikian halnya dengan suku-suku dan bangsa-bangsa diseluruh dunia.

Namun apabila suatu solidaritas sosial dapat mengalahkan dan dapat menaklukan solidaritas sosial yang lain, keduanya akan bercampur baur dengan akrabnya, yang kalah memberi dukungan tenaga kepada yang menang, dan kemudian secara bersama-sama menuntut tujuan yang lebih tinggi dari kedaulatan yang dimilikinya

sebelum itu. Demikianlah terus menerus, sehingga kedaulatannya sama dengan kedaulatan negeri yang sedang berkuasa itu sudah tua umur akhirnya, apabila negara yang berkuasa itu sudah tua umurnya dan para pembesarnya yang terdiri dari satu solidaritas sosial sudah tidak lagi mendukungnya, maka solidaritas sosial yang baru itu pun merebut kedaulatan negara yang sedang berkuasa itu. Dengan demikian, seluruh kedaulatan yang ada jatuh ke tangannya.

Kekuatan solidaritas sosial dapat juga sampai pada puncaknya ketika negara yang berkuasa belum lagi mencapai usia tua. Hal ini dapat terjadi bersamaan dengan kebutuhan negara yang berkuasa itu akan bantuan para pengikut solidaritas sosial lainnya untuk menentramkan suasana.<sup>4</sup>

Maka tujuan *Ashabiyah* adalah kekuasaan. Ibnu Khaldun berkata “Telah kami jelaskan bahwa *Ashabiyah* mendorong orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri, dan menolak atau mengalahkan musuh. Dia menjelaskan pula bahwa umat manusia secara naluri membutuhkan kekuatan pencegah atau pemimpin dalam suatu komunitas agar mereka tidak saling menyakiti. Pimpinan semacam ini harus mempunyai kekuatan *Ashabiyah*. Jika tidak, kekuatannya tidak akan sempurna. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah simbol kekuatan dan memerintah dengan paksa. Jika telah meraih apa yang dicari, pemilik *Ashabiyah* akan mencari yang lebih dari itu. Jika telah menduduki kepala suku dan ditaati orang, jika suatu ketika menemukan jalan untuk memiliki

---

<sup>4</sup>Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, penerjemah: Ahmadie Thoha, (Jakarta: PustakaFirdaus, 1986), h. 166-167

kedaulatan lain, ia tidak akan mengembalikannya, sebab memang demikian yang diharapkan. Namun, ia tidak akan dapat meraihnya dengan mudah apabila tidak memiliki *Ashabiyah* yang menyebabkan orang lain tunduk dan patuh kepadanya. Dan demikianlah, kekuasaan adalah tujuan akhir “*Ashabiyah*”.

Kekuasaan merupakan tujuan akhir *Ashabiyah*. Jika satu *Ashabiyah* telah mencapai maksud tersebut, suku (yang menjadi pengikut *Ashabiyah*) turut memegang kekuasaan, baik secara langsung atau bantuan saja, kecuali apabila *Ashabiyah* tersebut mendapat rintangan dari dua hal yaitu :

1. Suku pemegang *Ashabiyah* memperoleh kemewahan dan tenggelam dalam kenikmatan sehingga sifat liarnya menjadi hilang, menjadi lemah pula *Ashabiyah* dan keberaniannya. Mereka menikmati kemewahan yang Allah berikan. Kemewahan adalah salah satu rintangan memperoleh kemewahan.
2. Suku pemegang *Ashabiyah* tersebut tunduk pada suku yang lain. Tentu saja, suku yang bersangkutan tidak dapat bertahan dan berjuang sehingga tidak akan sampai pada tujuan yang terakhir, yakni kekuasaan.

### **C. Peran *Ashabiyah***

Dalam pertarungan menuju puncak ini, Ibnu Khaldun ini melihat bahwa peranan solidaritas atau *Ashabiyah* sangat menentukan. Bahwa dalam tulisan ini kata-kata *Ashabiyah* itu diterjemahkan dengan “solidaritas”, “perasaan solidaritas”, atau “kelompok solidaritas”,

tergantung dari kedudukan dan konteksnya dalam kalimat. Dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun, solidaritas adalah motor yang menggerakkan dan mendorong orang untuk terus maju ke depan sampai ke puncak, yaitu kekuasaan negara. Karena itu, jelaslah kiranya bahwa konsep *Ashabiyah* juga merupakan konsep kunci dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Namun demikian, para sarjana Khalduni mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian istilah ini, terutama apabila dikaitkan dengan gejala kepolitikan yang berkembang selanjutnya. Ada diantara mereka yang menerjemahkan dengan istilah yang terbatas ruang lingkupnya, seperti “hubungan darah”, “perasaan kesukuan”, “perasaan kelompok”, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Peran *Ashabiyah* menurut Ibnu Khaldun yaitu suatu suku yang mungkin dapat membentuk dan memelihara suatu negara apabila suku itu memiliki sejumlah karakteristik sosial politik tertentu, yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan *Ashabiyah*. Karakteristik ini justru berada hanya dalam kerangka kebudayaan desa. Oleh karena itu penguasaan atas kekuasaan dan pendirian negara, sehingga munculnya kebudayaan kota akan membuat sirnanya *Ashabiyah* yang mengakibatkan lemahnya suatu negara.

Ibnu Khaldun tidak menyederhanakan persoalan hanya dengan menyatakan bahwa kekuatan *Ashabiyah* yang akan menghasilkan kebenaran. Ia melihat bahwa *Ashabiyah* yang kuat biasanya mempunyai seorang pemimpin yang baik pula. Pribadi kekuatan dan

---

<sup>5</sup>Hermawan Sulisty, *Pemikiran Politik Islam: Islam Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Grafika Indah, 2004), h. 86

kebenaran biasanya berjalan seiringan. *Ashabiyah* yang kuat juga menunjukkan watak yang baik dan kualitas kepemimpinan yang tinggi.

*Ashabiyah* merupakan kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. Bilamana negara atau dinasti tersebut telah mapan ia akan berupaya menghancurkan *Ashabiyah*. *Ashabiyah* mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Bila *Ashabiyah* itu kuat, maka negara yang muncul akan luas, sebaliknya bila *Ashabiyah* lemah, maka luas negara yang muncul relatif terbatas.<sup>6</sup>

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa penguasa yang telah sampai ke puncak, yaitu kekuasaan negara, tidak lagi begitu membutuhkan kelompok solidaritas yang telah mengantarkannya ke puncak itu. Kekuasaannya makin lama makin terpusat dan melembaga. Dalam keadaan seperti itu, ia lebih membutuhkan pendukung dari jenis lain yang lebih profesional, terutama untuk mengelola dua bidang khusus yang dilambangkan Ibnu Khaldun dengan birokrasi yang menata dan menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, dan tentara yang lebih efisien yang akan menjaga negara dan kekuasaannya dari setiap ancaman dan tantangan.<sup>7</sup>

Kekuasaan negara adalah puncak dari segala kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Karena itu, kekuasaan negara itu adalah kekuasaan yang sempurna. Tidak ada lain lagi kekuasaan yang

---

<sup>6</sup>Ibn Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, diterjemahkan oleh Masturi Irham, dkk, (Jakarta: Pusaka al- Kautsar, 2011), h. 5

<sup>7</sup>Hermawan Sulistyono, *Pemikiran Politik Islam,.....*, h. 87



lebih tinggi dari padanya. Namun Ibnu Khaldun juga melihat bahwa ada pula kekuasaan yang tidak sempurna, kekuasaan yang semacam ini terdapat hampir dalam setiap hubungan manusia dalam bentuk dan jumlah yang tidak terhitung dalam masyarakat manusia. Segala bentuk kekuasaan lain tentu saja berada di bawah kekuasaan negara atau merupakan bagian dari kekuasaan negara itu. Kekuasaanlain itu tidak sempurna. Jadi, kekuasaan seseorang yang melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan penguasa negara, seperti kekuasaan gubernur di daerah, kekuasaan menteri yang mengelola sebagian dari tugas negara, seperti masalah pajak dan keuangan, masalah kemiliteran, semuanya termasuk ke dalam golongan kekuasaan tidak sempurna. Kekuasaan dalam jenis ini terdapat dalam hampir setiap hubungan, lapisan, dan tingkatan yang ada di dalam masyarakat manusia. Masing-masing hubungan itu melainkan peranan tersendiri yang juga penting dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pandangannya Ibnu Khaldun yang khas tentang politik ini, maka agama dan moralitas seharusnya merupakan komponen pokok dari politik dan segala perbuatan yang bersifat politik. Tampak bahwa pada pendapatnya, praktek harus benar-benar sejalan dengan kepercayaan, sehingga dalam bidang politik, seperti halnya dalam bidang agama, yang menjadi tujuan pokok bukanlah hanya *orthodoxe* (kepercayaan yang benar)saja, akan tetapi juga *orthopraxis* (tindakan yang benar). Dengan begitu, kepercayaan yang benar sejalan dengan praktek yang benar. Manusia tidak lagi terbelah dalam kehidupannya. Manusia benar-benar menjadi makhluk yang

utuh, terutama sekali dalam hubungannya dengan tuhan, sesama manusia, alam dan lingkungannya, dan juga dengan dirinya sendiri. Manusia benar-benar menjadi makhluk yang utuh, yang tidak mengenal lagi bentuk apapun karena ia telah menemukan hakikat dirinya, mengerti posisi dirinya dan fungsinya dalam eksistensi alam semesta ini, serta sadar dan tahu kemana tujuan hidupnya.

Karena negara menurut Ibnu Khaldun adalah penjelmaan dari kekuasaan dalam bentuknya yang paling sempurna, maka berbagai jenis dan tingkat kekuasaan lain berada di bawah kekuasaan negara atau merupakan bagian atau salah satu aspek darinya. Namun bagian kekuasaan itu tetaplah mendapat perhatian yang penting. Ibnu Khaldun membahas masalah kekuasaan yang tidak sempurna ini dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi dan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun sadar sepenuhnya bahwa pengaruh aspek kekuasaan ini tidak hanya terbatas pada bidang-bidang yang biasanya dianggap sebagai bidang politik, akan tetapi merasuki bidang-bidang yang lain dari kehidupan manusia, seperti misalnya bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan bahkan juga sastra.

Kekuasaan dalam dunia ini adalah sebagian dari *Sunat Allah* (*sunatullah*) yang mengandung pengertian kemajuan (*progress*) karena setiap kekuasaan baru umumnya membangun sejarahnya di atas tumpukan pengalaman kekuasaan-kekuasaan yang lama, kecuali pada saat itu terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sejarah dunia. Tugas dari masing-masing dalam mengembangkan kekuasaan dan

dalam kehidupan bernegara adalah berbuat dalam bentuk yang sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan dunia.

Pemikiran politik Ibnu Khaldun memiliki beberapa kekhasan yang dapat dipakai sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah-masalah politik yang kita hadapi sekarang ini. Pandangan yang menyatakan bahwa politik itu kotor dan licik dapat ditinjau ulang dengan berpedoman kepada pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa politik adalah kekhasan manusia saja sebagai makhluk tertinggi dan termulia. Karena itu kehidupan politik harus dihadapi dengan segi-segi terbaik yang dimiliki manusia, yaitu segi moral dan agama. Negara pada dasarnya bukan ajang pertentangan tetapi ajang persatuan dan kerjasama, pertama-tama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok dan pertahanan diri, dan untuk meningkatkan kualitas manusia dengan jalan membangun bumi ini dengan aman dan sejahtera.<sup>8</sup>

*Ashabiyah* biasanya dihubungkan hanya dengan aspek material fisik. Namun, Ibnu Khaldun tidak hanya menghubungkannya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan maknawi yang berpusat pada etika dan agama. Ia berkata: Tabiat manusia adalah mendirikan negara karena di dalamnya ada implikasi-implikasi sosial. Berdasarkan fitrahnya dan kekuatan akal rasionalnya, manusia lebih dekat kepada sisi kebaikan dari pada sisi keburukan. Sebab, keburukan berasal dari kekuatan-kekuatan kebinatangan yang ada pada dirinya. Karena seorang manusia, ia lebih dekat kepada kebaikan. Dengan demikian yang cocok dengan kekuasaan dan politik adalah kebaikan.

---

<sup>8</sup>Hermawan Sulistyono, *Pemikiran Politik Islam, .....*, h. 92

Disini Ibnu Khaldun mengkaitkan politik dengan etika dan agama. Sementara itu, politik dan kekuasaan berkaitan dengan kebaikan. Dalam kaitan ini, Ibnu Khaldun menambahkan bahwa “politik dan kekuasaan merupakan perwakilan tuhan untuk umat manusia dan merupakan perwakilan tuhan kepada manusia untuk melaksanakan hukum-hukumnya yang berlaku untuk hamba-hambanya. Dan hukum-hukum Allah itu tidaklain hanya untuk kebaikan dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatannya. Hal ini di perlihatkan oleh syariat Islam yang barang siapa memperoleh *Ashabiyah* berdasarkan jaminan kekuasaan tuhan, dan siapa diberi tuhan sifat-sifat baik yang sesuai untuk kebutuhan melaksanakan hukum-hukum Allah yang berlaku pada ciptaannya, orang tersebut telah mempunyai persiapan untuk menerima tugas khalifah dari tuhan dan menjadi penjamin terhadap manusia.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa gerakan keagamaan tanpa *Ashabiyah* tidak akan sempurna. Alasannya, rakyat hanya bisa digerakkan dan bangkit bertindak berkat dorongan *Ashabiyah*. Di dalam sebuah hadist sahih disebutkan, “ Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali ia berada dalam penjagaan kaumnya”. Demikian yang terjadi dengan para nabi yang sudah jelas merupakan manusia-manusia yang paling mulia dan memiliki kelebihan. Bagaimana manusia biasa yang tak mempunyai kelebihan seperti mereka akan sukses tanpa *Ashabiyah*. Maknanya, agama mengokohkan *Ashabiyah*. Namun, agama sendiri tidak akan tegak tanpa *Ashabiyah*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam, .....*, h. 422-424

Dengan demikian atas penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka maksud dari teori *Ashabiyah* ini adalah teori kelompok solidaritas sosial atau kelompok dalam satu ikatan keluarga atau kerabat, yang dimana teori ini lebih mementingkan persaudaraannya dibandingkan orang lain. *Ashabiyah* ini bertujuan untuk mencari kedaulatan terhadap kekuasaan yang ingin dicapainya. Dan *Ashabiyah* ini berperan penting dalam menciptakan suatu negara yang aman yang terhindar dari kekacauan. Maka dari itulah agar terciptanya suatu negara yang aman dan terhindar dari kekacauan harus adanya suatu peran penting dalam mencapai kekuasaan dengan baik yaitu dengan cara adanya peran *Ashabiyah* ini, sehingga nantinya suatu kekuasaan negara tersebut akan berjalan dengan baik.